



## DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2484>  
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

### PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PULAU KAYU

Ainal Mardhiah<sup>1</sup>, Safrida<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar Aceh, Indonesia

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar Aceh, Indonesia

[Safrida1290@utu.ac.id](mailto:Safrida1290@utu.ac.id)

#### ARTICLE INFORMATION

*Article history:*

Received date: 14 Juli 2022

Revised date: 30 September 2022

Accepted date: 30 Oktober 2022

#### ABSTRACT

*Community empowerment is part of economic development in Indonesia. One of the community empowerment strategies is the allocation of village funds by the government. This study uses a qualitative methodology, with the methods of observation, interviews and documentation. The purpose of this study was to identify and analyze the role of the government in empowering women to improve the community's economy. The results of this study indicate that training to the community will improve the community's ability in women's empowerment programs and conduct outreach to rural communities to find out about women's empowerment programs. After completion of socialization, training and development will continue to be carried out to the community to implement women's empowerment programs in accordance with the government's goal of improving the community's economy through women's empowerment programs. And through community participation so that it can continue to run and be utilized by Pulau Kayu Village, Susoh District, Southwest Aceh Regency and make improvements and program developments if there are deficiencies.*

#### ABSTRAKSI

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan adanya alokasi dana desa oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan dengan pelatihan kepada masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar mengetahui program pemberdayaan perempuan. Selesai pelatihan dan sosialisasi maka akan terus dilakukan pendampingan dan pengembangan kepada masyarakat untuk mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan sesuai dengan tujuan pemerintah ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan perempuan. Dan melalui partisipasi masyarakat agar dapat terus berjalan dan digunakan oleh Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya serta melakukan perbaikan dan pengembangan program apabila terdapat kekurangan.

2022 UPNVJT. All rights reserved

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan dan akan terus meningkat apabila seluruh komponen masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional (Khasanah, 2021). Revolusi Industri 4.0 yang sedang berlangsung saat ini sangat berpengaruh terhadap perubahan kehidupan masyarakat, terutama perempuan. Perempuan tidak hanya berperan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), tetapi saat ini perempuan dituntut untuk dapat melakukan hal-hal yang lebih luas di luar rumah seperti membuka usaha atau menjadi perempuan karir (Utami, 2019).

Salah satu peran perempuan untuk meningkatkan pembangunan nasional adalah dengan ikut serta dalam menciptakan dan mengembangkan program-program yang mengarah pada pemberdayaan perempuan (Syarif, 2018). Pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender ini diakui oleh komunitas internasional dan diartikulasikan dalam UN *Sustainable* Tujuan Pembangunan (PBB, 2016). Dalam upaya mengatasi kesenjangan gender, banyak organisasi telah mengakui bahwa pemberdayaan perempuan secara ekonomi dapat berkontribusi untuk mencapai kesetaraan gender serta mengurangi kelaparan dan kemiskinan (PBB, 2018; FAO, 2011; Shahbaz et al., 2017; Bent, 2019) (Niyonkuru & Barrett, 2021). Menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan telah digunakan sebagai kata sandi untuk meningkatkan daya saing ekonomi (Topal, 2019).

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di lingkungan sekitarnya (M.Yani., Beki Suroso., 2019). Pemberdayaan perempuan disini dilakukan dengan memberi motivasi, pola pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, penyuluhan kewirausahaan, membekali perempuan sehingga dapat bekerja, berusaha dan dapat memiliki penghasilan (Sadjuri, 2004). Jika perempuan tidak diberdayakan dan kesetaraan gender dicapai sehingga perempuan dapat memainkan peran mereka di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, negara tidak akan mencapai pembangunan berkelanjutan (Bayeh, 2016). Dibentuknya kelompok pemberdayaan

perempuan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam membantu ekonomi keluarga.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan (Kurniawati et al., 2013). Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan terencana dan kolektif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat (“Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR),” 2020). Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan (Habib, 2021). Melalui keluarga yang sejahtera dapat menjadikan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, tentram, harmonis, dan damai (Tjiptaningsih, 2017). Pemberdayaan dipandang sebagai suatu proses, dimana dalam proses terdapat berbagai tahapan yang dilakukan secara berkelanjutan serta tidak dapat dilaksanakan dengan cara instan (Alfianto & Lambelanova, 2021).

Upaya Pemberdayaan yang berkemampuan suatu usaha dalam membangun serta dapat mengatasi suatu persoalan mengembangkan suatu potensi dengan menyelesaikan permasalahan. Pemberdayaan berasal dari kata dasar ‘daya’ yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Daya yang mendapat awalan ber- sehingga menjadi kata ‘berdaya’ artinya memiliki atau mempunyai daya, berkekuatan, berkemampuan, mempunyai akal untuk mengatasi sesuatu. Sehingga Pemberdayaan artinya membuat berdaya, membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya/kekuatan (Nur, 2019). Pemberdayaan adalah cara untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*) agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (Hasanah,

2013). Salah satu cara menerapkan pemberdayaan perempuan ialah dengan cara melakukan penguatan motivasi terhadap masyarakat agar dapat berperan ataupun berpartisipasi dalam mengembangkan potensi sehingga program pemberdayaan perempuan dapat berjalan secara efektif dan akan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan perekonomian, Pemerintah Daerah memiliki hak otonom terhadap pengembangan dan pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Aceh Barat Daya. Peningkatan ekonomi merupakan suatu hal yang sepenuhnya harus dilakukan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat (Nurmalia et al., n.d.). Pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Begitu pula dengan pemerintahan daerah Aceh Barat Daya yang tentu saja memiliki kewenangan dan peran penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Aceh Barat Daya, tentu saja pemerintah wilayah Aceh Barat Daya harus membentuk kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

Komitmen pemerintah untuk mempercepat ekonomi masyarakat sangat gencar dilakukan begitu pula pemerintah Aceh Barat Daya. Pemerintah daerah Aceh Barat Daya dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di setiap desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dengan memberikan anggaran sebesar 20% yang diambil dari dana desa untuk membentuk program kelompok pemberdayaan perempuan. Pemerintah menyarankan agar kegiatan di setiap kelompok harus sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang bisa dikelola di desa masing-masing. Salah satu kelompok pemberdayaan perempuan tersebut di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Desa Pulau Kayu merupakan salah satu desa pesisir yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang besar untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Masyarakat pesisir memiliki kondisi ekonomi yang relatif rendah (Hilyana et al., 2019). Sebagian besar (63,47%) penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir dan pedesaan (Butarbutar et al., 2020). Masyarakat pesisir umumnya kepala keluarga memiliki pekerjaan sebagai nelayan penangkap ikan di laut, sedangkan para istri bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Masyarakat Desa Pulau Kayu terutama para ibu-ibu membentuk beberapa kelompok usaha, yaitu salah satunya Kelompok Pemberdayaan Perempuan Sepakat. Kelompok tersebut terdiri dari 6 anggota. Kelompok Pemberdayaan Perempuan Sepakat memilih untuk melakukan produksi ikan asin karena desa tempat mereka tinggal berada di wilayah pesisir. Dengan adanya Kelompok Pemberdayaan Perempuan Sepakat tersebut ikan yang dulunya mempunyai harga jual yang rendah sekarang malah sebaliknya dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Mereka membeli ikan pada nelayan yang mencari ikan dengan perahu kecil dan peralatan jaring yang sederhana. Dengan adanya Kelompok Pemberdayaan Perempuan Sepakat maka juga dapat membantu para nelayan kecil yang ikan hasil tangkapan mereka dibeli dengan harga rendah oleh konsumen yang lain.

Banyak pihak yang memiliki peranan dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat (Fitrianto et al., 2020). Untuk mencapai program pemberdayaan perempuan agar berjalan secara efektif dan berkelanjutan maka sangat dibutuhkan peran pemerintah, dimana adanya peran pemerintah dapat memberikan dukungan baik dalam segi fisik maupun non fisik. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi, aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi, suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Secara umum peran dapat diartikan sebagai suatu yang berpengaruh penting terhadap terlaksananya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan (Kusmanto, 2013). Peran pemerintah di kelompok pemberdayaan tentu pasti sangat diperlukan begitupun sebaliknya dengan kelompok-kelompok pemberdayaan yang ada di desa Pulau Kayu agar kelompok-kelompok yang ada di desa Pulau Kayu dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama, program dapat berkelanjutan dan berjalan dengan efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu akan menjadi bahan dasar yang menjadi acuan sekaligus referensi bagi penulis terkait peran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat untuk penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun

penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis diantaranya menurut: Penelitian Haque et al. (2015), Tiara & Bachtiar (2018) kemudian penelitian Irwan (2020). Hasil ketiga penelitian ini menjelaskan bahwa proses pemberdayaan perempuan melakukan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Sedangkan faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian adalah minimnya keterlibatan warga, semakin berkurangnya generasi penerus dan persaingan harga. Maka kemudian penulis menyimpulkan untuk dapat melaksanakan program pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan memfasilitasi, partisipasi, sosialisasi, pelatihan, diskusi, pembinaan serta penyuluhan motivasi dan pelatihan kepada kelompok pemberdayaan.

Secara sederhana, pendekatan ABCD dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada aset lokal yang terdapat di suatu wilayah. Aset tersebut dikembangkan sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah lokasi pemberdayaan dilakukan (Fithriyana, 2020). Penelitian ini melakukan pendekatan ABCD sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, kabupaten Aceh Barat Daya Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCD ini, akan mampu memberikan kesempatan kepada mitra (masyarakat yang diberdayakan) yang ada di Desa Pulau Kayu untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dengan menggunakan potensi yang dimilikinya sendiri, sehingga akan menciptakan suatu kemandirian bagi masyarakat mitra (Alhamuddin, Aziz, Inten, & Mulyani, 2020) (Habib, 2021). Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan yaitu Problem Based Approach, Need Based Approach, Right Based Approach, dan Asset Based Approach (Widjajanti, 2011). Problem Based Approach merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Aspek Need Based Approach merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Aspek Right Based Approach, merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan (materi) untuk pemberdayaan masyarakat. Aspek Asset Based Approach, merupakan aspek pemberdayaan

masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri (Habib, 2021)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis melakukan penelitian tentang “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Pulau Kayu” untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat Desa Pulau Kayu. Kemudian dengan dilakukannya penelitian ini, maka akan dapat mengetahui adanya peran pemerintah atau tidaknya dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Kayu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar nantinya dapat dijadikan bahan perbaikan di waktu yang akan datang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari hasil wawancara lisan atau tulisan dan juga dari hasil perilaku subjek penelitian yang bisa diamati (S. Aminah & Roikan 2019). Melalui metode ini penulis dapat menghasilkan analisis yang lebih deskriptif daripada prediktif. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam sudut pandang subjek penelitian. Melalui metode ini penulis dapat mendeskripsikan secara rinci peran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun waktu penelitian dimulai dari akhir bulan Januari hingga akhir bulan Mei.

Data penelitian ini bersumber dari data primer yang dihasilkan melalui wawancara dengan pemilihan informan penelitian menggunakan teknik (purposeful sampling) yaitu pemilihan informan penelitian bergantung pada tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisnya, Patton dalam (Afifuddin, 2012). Cara melakukan teknik pengumpulan data ialah dengan wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, melakukan observasi terlibat, melakukan diskusi kelompok fokus (Prof. Dr. Afrizal, M.A., 2010) Dalam hal ini peneliti mewawancarai aparatur Desa Pulau Kayu. Sumber data lainnya juga di peroleh dari data sekunder yang di hasilkan dari studi kepustakaan,

mencari referensi yang bersumber dari artikel jurnal, Undang-Undang, dan media sosial/internet. Kemudian dalam melakukan analisa data lapangan penulis menggunakan 3 langkah analisis data yakni reduksi data, pengumpulan informasi, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilakukan Pendekatan berbasis Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (WEE) untuk keadilan sosial telah menarik perhatian yang meningkat antara cendekiawan dan organisasi berbasis pembangunan sebagai sarana untuk meningkatkan akses perempuan ke ekonomi sumber daya dan meningkatkan pemberdayaan perempuan (Niyonkuru & Barrett, 2021).

Pemberdayaan masyarakat sangat sering diucapkan dan dikenal dalam masyarakat, hal ini terjadi karena angka kemiskinan di masyarakat semakin meningkat di Indonesia. Kemiskinan tidak hanya terjadi di perdesaan yang masih terbatas informasinya, akan tetapi kemiskinan juga dapat terjadi di perkotaan. Dari tahun ke tahun pemerintah telah memberdayakan masyarakat dengan program yang diluncurkan oleh semua pihak baik itu dari pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dan juga organisasi profesi. Program yang diluncurkan tersebut adalah untuk menegakkan kemiskinan, akan tetapi banyak dari program-program tersebut belum dapat terlaksanakan dengan baik. Pemberdayaan perempuan dalam domain pendapatan memberikan hasil yang signifikan tetapi positif, yang menunjukkan bahwa beberapa mekanisme non-ekonomi seperti adat dan norma patriarki dapat mencegah perempuan mengendalikan pendapatan rumah tangga mereka. Akibatnya, perempuan cenderung menghabiskan lebih sedikit uang untuk mengakses makanan (Aziz et al., 2021).

Eksistensi perempuan saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata lagi, karena hadirnya perempuan di berbagai bidang mulai dari politik, ekonomi, sosial dan lain-lain menunjukkan bahwa perempuan berperan penting dalam kemajuan suatu negara (Haque et al., 2015). Perempuan berperan di bidang ekonomi dengan ikut masuk ke ranah publik membantu suaminya, maka akan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik bagi ekonomi rumah tangganya maupun bagi dirinya sendiri (Yafiz et al., 2015). Tentu berbagai cara telah dilakukan baik dari segi pihak pemerintah maupun masyarakat

sendiri sebagai bentuk keseriusan dalam memberdayakan perempuan. Tak terkecuali Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memberdayakan kaum perempuan di daerah tersebut tentunya melalui berbagai tahap dalam proses.

Dalam pendekatan ABCD, masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan tidak disebut sebagai kelompok yang lemah atau tidak memiliki potensi apa-apa, namun masyarakat justru dipandang sebagai suatu kelompok yang sebenarnya telah memiliki potensi untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan, termasuk permasalahan peningkatan taraf hidup (sosi-ekonomi).

### 1) *Problem Based Approach*

Potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Dengan adanya kesadaran ini, masyarakat setempat akan melakukan perubahan atau berusaha untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya. Dengan demikian, aspek “kesadaran akan masalah” ini, merupakan aspek yang sangat penting karena tanpa adanya kesadaran, masyarakat tidak akan berusaha berubah dari kondisi permasalahan yang sebenarnya tengah dihadapi. Dengan cara melakukan sosialisasi maka akan terjawab akan masalah apa yang tengah dihadapi.

Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang (organisasi/perusahaan/lembaga tertentu) memberitahukan suatu informasi untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan merupakan kegiatan awal dari serangkaian proses pemberdayaan dan bagaimana peran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam menyampaikan apa saja yang terkait dalam proses pemberdayaan perempuan. Dalam wawancara para informan mengatakan :

*”Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan itu sudah kita laksanakan di Desa Pualu Kayu Kecamatan Susoh di Kabupaten Aceh Barat Daya semenjak tahun 2018. Dimana disaat aparat desa melakukan penyerahan kelompok pada saat itu lah diadakan sosialisasi tentang*

*bagaimana program pemberdayaan tersebut (wawancara)”*.

Salah satu anggota kelompok program pemberdayaan mengatakan bahwa :

*“Sosialisasi tentang apa yang dimaksud dengan program pemberdayaan itu telah dilakukan pada saat penyerahan kelompok kepada masyarakat (wawancara).*

Pernyataan kepala Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh dan salah satu anggota kelompok program pemberdayaan perempuan tersebut menunjukkan adanya sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut. Sebelum melakukan pemberdayaan, hal yang harus dilakukan adalah pembekalan terhadap fasilitator yaitu dengan cara sosialisasi (Fitrianto et al., 2020). Dengan adanya sosialisasi kewirausahaan dan tata cara penerimaan bantuan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan agar dapat memotivasi mereka dalam mengembangkan kemampuan yang mereka miliki serta dapat meningkatkan mutu dan taraf hidup keluarga mereka (Kurniawati et al., 2013). Tahap sosialisasi ialah suatu kegiatan awal dari proses program pemberdayaan dengan melakukan sosialisasi akan menjawab semua permasalahan yang tengah dihadapi.

## **2) Need Based Approach**

Aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Kebutuhan dasar merupakan hal yang sangat penting dan harus terpenuhi terlebih dahulu dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan kebutuhan hidup, kenyamanan dan kesejahteraan. Kebutuhan anggota masyarakat berupa sandang, pangan, dan papan, merupakan hal yang harus ada pada tiap-tiap anggota masyarakat sebagai wujud tercukupinya kebutuhan dasar. Aspek ini harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum masyarakat diberdayakan untuk melakukan sebuah perubahan. Hal ini dikarenakan masyarakat akan sangat susah untuk diberikan inovasi-inovasi pemberdayaan sebelum terpenuhinya kebutuhan dasar terlebih dahulu. Melalui pendampingan akan terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pendampingan yaitu suatu proses mengorganisasikan kegiatan dimana didalamnya terdapat proses yang berupa penentuan tujuan,

pembentukan lembaga/unit pembinaan, penyusunan rencana kerja kelompok pemberdayaan perempuan dan semua proses yang terkait dalam pemberdayaan kelompok usaha. Pendampingan sosial hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat dalam membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat (Sulaeman, 2020). Pendampingan ini perlu adanya untuk meningkatkan kapasitas para pelaku kelompok usaha, terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran. Setidaknya dengan adanya pendampingan para pelaku kelompok usaha bisa menemukan potensi apa yang ada pada diri mereka, dan bisa membantu mereka menyelesaikan masalah sendiri. Peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran teknis bagi masyarakat yang didampinginya (Nugraha, 2009). Dalam pemberdayaan perempuan bentuk pendampingan yang dilakukan yaitu, persiapan pendampingan seperti mempersiapkan bahan pendukung, pelaksanaan pendampingan dilakukan dalam bentuk kunjungan, observasi dan diskusi, bentuk pendampingan yang terakhir adalah monitoring atau evaluasi seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan. Hal tersebut senada dengan yang diutarakan oleh bapak kepala Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya , bahwa :

*“sama halnya dengan sosialisasi, pendampingan juga kita lakukan di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, pendampingan yang kami lakukan yaitu pendampingan kelompok usaha pemberdayaan perempuan di Desa Pulau Kayu kecamatan Susoh, pada proses pendampingan kita pun juga bekerja sama dengan Ibu-ibu PKK dan aparat Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (wawancara)”*.

Salah satu anggota kelompok program pemberdayaan perempuan Desa Pulau Kayu mengutarakan bahwa :

*“kelompok sudah diberikan pendampingan dengan bersama dengan ibu-ibu PKK Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (wawancara)”*.

Maksud dari pernyataan diatas yaitu pendampingan telah dilakukan untuk kelompok-kelompok pemberdayaan perempuan. Pendampingan social dengan demikian dapat

diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja social untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti : Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya setempat., memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konsep pemberdayaan masyarakat (Nugraha, 2009). Masyarakat perlu bentuk pendampingan dalam menjalankan program pemberdayaan guna memberikan solusi dalam segala hal.

### **3) Right Based Approach**

Aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan (materi) untuk pemberdayaan masyarakat. Prinsip aspek ini adalah menggunakan bantuan modal (dana awal) untuk memulai melakukan sebuah usaha perubahan menuju kemandirian. Pemberian modal ini digunakan untuk menunjang kegiatan dalam proses pemberdayaan. Aspek ini cukup penting karena untuk berjalannya sebuah program di awal awal, butuh dana operasional agar kegiatan pemberdayaan dapat berjalan sesuai rencana. Melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat.

Pelatihan perempuan merupakan suatu bentuk pemberian berbagai macam pemahaman tentang bagaimana seharusnya perempuan bila diperhadapkan dengan kondisi sosial yang ada baik dalam bentuk teori maupun praktik. Guna meningkatkan ketrampilan dan menambah pendapatan keluarga di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, mengadakan pelatihan berbagai macam kelompok usaha yang ada di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya agar dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai misalnya salah satu kelompok pemberdayaan perempuan di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya : Kelompok usaha ikan asin sepakat, Dengan adanya Kelompok Pemberdayaan Perempuan Sepakat tersebut ikan yang dulunya mempunyai harga jual yang rendah sekarang malah sebaliknya dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Mereka membeli ikan pada nelayan yang mencari ikan dengan perahu kecil dan peralatan jaring yang sederhana. Dengan adanya Kelompok Pemberdayaan

Perempuan Sepakat maka juga dapat membantu para nelayan kecil yang ikan hasil tangkapan mereka dibeli dengan harga rendah oleh konsumen yang lain. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya terkait pelatihan kelompok usaha yang mengemukakan bahwa :

*“Pelatihan belum kita lakukan dan yang terkait kelompok usaha yaitu pelatihan seperti bimbingan pengolahan, manajemen, dll untuk kelompok usaha perempuan (wawancara)”*.

Salah satu anggota kelompok program pemberdayaan mengatakan bahwa :

*“kami belum mengikuti pelatihan seperti bimbingan, manajem, produksi, pengolahan, kelompok menjalankan prosesnya secara masing-masing (wawamcara)”*.

Pernyataan diatas menunjukkan tidak adanya pelatihan terhadap kelompok usaha secara teoritik belum dilaksanakan dengan materi bimbingan manajemen untuk kelompok usaha perempuan. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat adalah salah satu bentuk pelayanan umum yang diselenggarakan oleh negara. Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu (Wardhani et al., 2015). Pelatihan akan memberikan berbagai macam pemahaman tentang program pemberdayaan, dengan adanya pelatihan akan diperhadapkan dengan kondisi sosial yang ada baik dalam bentuk teori maupun praktik.

### **4) Asset Based Approach**

Aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Potensi yang dimaksud di sini seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, gotong royong, dan solidaritas masyarakat setempat. Beberapa potensi inilah yang merupakan aset besar dan sangat berharga dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui rasa kebersamaan, kerukunan dan solidaritas dalam diri masyarakat, diharapkan dapat memunculkan kecerdasan, kepekaan sosial, sehingga masyarakat dapat dengan mudah bekerja sama dengan solid dan mampu menciptakan inovasi inovasi produk usaha baru yang mengagumkan. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan terjalin potensi masyarakat antara lain seperti kecerdasan,

kepedulian, partisipasi, gotong royong, dan solidaritas masyarakat setempat. Agar dapat terwujud aspek Asset Based Approach maka peran serta dan kerja sama dari seluruh masyarakat yang ada sangat diperlukan sekali, karena salah satu faktor yang menentukan dalam terlaksananya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam setiap tahapan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan dan tahap evaluasi. Melalui pemberdayaan yang berbasis partisipasi masyarakat ini akan dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, yang benar-benar

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi ekonomi yang dilakukan perempuan dan mengkaji menantang kegiatan ini hadir untuk peran gender mereka, dengan fokus pada tiga lingkaran domestik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari wanita yang mereka gunakan sebagai sumber kegiatan yang menghasilkan pendapatan (Abu-Rabia-Queder, 2019). Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, pengambilan keputusan dan partisipasi representative (Isbandi, 2007). Seperti yang diutarakan oleh Kepala Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya terkait partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan perempuan yang mengemukakan bahwa :

*"Partisipasi masyarakat tentang pemberdayaan perempuan masih kurang, baik dari bentuk partisipasi yang nyata dalam bentuk wujud maupun sebaliknya (wawancara)"*.

Salah satu masyarakat Desa Pulau Kayu mengutarakan bahwa :

*"Belum tertarik ikut serta dalam program pemberdayaan karna tidak berjalan sesuai dengan keinginan ataupun sesuai tujuan (wawancara)"*.

Pernyataan diatas menunjukkan kurang adanya partisipasi masyarakat baik dari segi jenis partisipasi tersebut terhadap program kelompok pemberdayaan. Penggunaan dana desa, harus

melibatkan masyarakat secara luas, karena dalam penggunaan dana desa kebutuhan dan sikap masyarakat menjadi sangat penting, terutama pada tingkat partisipasi masyarakat (Atmojo et al., 2017). Berjalannya suatu kegiatan itu diperlukan proses yang panjang dan proses itu diharapkan memberikan hasil yang optimal bagi pihak pelaksana kegiatan dan peserta dalam kegiatan tersebut (Haque et al., 2015). Partisipasi masyarakat setempat juga dapat dijadikan sebuah ukuran bagi pembangunan desa, dimana tanpa adanya partisipasi maka jelaslah bahwa pembangunan yang dilaksanakan tersebut bukan pembangunan desa yang sesungguhnya (Sadjuri, 2004). Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan program pemberdayaan perempuan dapat berjalan secara efektif dan akan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berbagai macam pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa terlaksananya tahapan-tahapan pemberdayaan perempuan di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh itu tidak sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) melainkan dengan bantuan dari pihak LSM dan Ibu-ibu PKK, jadi optimalnya kegiatan Pemberdayaan bukan hanya menjadi peran DPMP4 melainkan banyak pihak yang terkait. Dengan pelatihan kepada masyarakat diharapkan akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar mengetahui program pemberdayaan perempuan. Selesai pelatihan dan sosialisasi maka akan terus dilakukan pendampingan dan pengembangan kepada masyarakat untuk mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan sesuai dengan tujuan pemerintah ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan perempuan. Dan melalui partisipasi masyarakat agar dapat terus berjalan dan digunakan oleh Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya serta melakukan perbaikan dan pengembangan program apabila terdapat kekurangan.

## REFERENCES

- S. Aminah & Roikan (2019). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik
- Prof. Dr. Afrizal, M.A. (2010). Metode Penelitian Kualitatif.
- Abu-Rabia-Queder, S. (2019). Embedded economy and empowerment: Public/private revisited. *Women's Studies International Forum*, 77(October), 102297. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.102297>
- Afifuddin. (2012). Metodologi Penelitian Kauntitatif. Pustaka Setia.
- Alfianto, D. N., & Lambelanova, R. (2021). Pendahuluan Perkembangan perekonomian nasional didasarkan pada tiga elemen yang perlu diperhatikan oleh suatu pemerintahan meliputi berbagai sumber daya , baik sumber daya alam , manusia , maupun teknologi . Elemen-elemen tersebut bergerak secara harmonis. 6(November), 91–114.
- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARISTO Sosial Politik Humaniora*, 5(1), 126–140. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/423>
- Aziz, N., Ren, Y., Rong, K., & Zhou, J. (2021). Women's empowerment in agriculture and household food insecurity: Evidence from Azad Jammu & Kashmir (AJK), Pakistan. *Land Use Policy*, 102(October 2020), 105249. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105249>
- Bayeh, E. (2016). The role of empowering women and achieving gender equality to the sustainable development of Ethiopia. *Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences*, 2(1), 37–42. <https://doi.org/10.1016/j.psrb.2016.09.013>
- Butarbutar, D. N., Sintani, L., & Harinie, L. T. (2020). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Perempuan. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 31–39.
- Fitrianto, A. R., Amaliyah, E. R., Safitri, S., Setyawan, D., & Arinda, M. K. (2020). Pendampingan dan Sosialisasi pada Usaha Toko Kelontong dengan Metode ABCD (Asset Based Community Development) Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Literasi Usaha Toko Kelontong. *Jurnal Abdidias*, 1(6), 579–591. <https://doi.org/10.31004/abdidias.v1i6.120>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106–134. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Haque, A. T., Setiawati, B., & Mustari, N. (2015). Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *OTORITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*, IV(1), 1–14.
- Hasanah, S. (2013). Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan). *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 71–88.
- Irwan, M. (2020). Pemberdayaan Desa Pondok Melalui Kelompok Wirausaha Anyaman Lidi. 8(2), 130–147.
- Isbandi. (2007). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. *EJournal Administrasi Negara*, 1(2), 27. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL DEA \(05-24-13-09-02-30\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL DEA (05-24-13-09-02-30).pdf)
- Khasanah, N. (2021). Peran Perempuan Pengrajin Tambah Dalam Peningkatkan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 8(1), 20. <https://doi.org/10.54131/jbma.v8i1.114>
- Kurniawati, D. P., Supriyono, B., & Hanafi, I. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 9–14. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/129/113>
- Kusmanto, H. (2013). Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, 1(1), 39–47. 1(1), 39–47.
- M.Yani., Bakti Suroso., M. M. (2019). Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. *Prodikmas*, 4, 31–39.

- Niyonkuru, P., & Barrett, H. (2021). Gender and intergenerational challenges to Women's economic empowerment initiatives in Rwanda. *World Development Perspectives*, 23(November 2020), 100340. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100340>
- Nugraha, A. (2009). Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5, 10. <http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>
- Nur, S. (2019). Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. *An-Nisa*, 10(1), 99–111. <https://doi.org/10.30863/annisa.v10i1.388>
- Nurmalia, L., Roshonah, A. F., Sholehuddin, & Zulfa, U. (n.d.). Durenseribu Depok Dalam Menggunakan Aplikasi.
- Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Corporate Social Responsibility (Csr). (2020). In *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* (Vol. 11, Issue 1, pp. 1–17). <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2230>
- Sadjuri, K. (2004). Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasis Partisipasi. *Jurnal Muwazah*, 02(02), 275–286. [https://scholar.google.com/scholar?start=60&q=peningkatan+kualitas+hidup+pemberdayaan+perempuan&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&u=%23p%3D7KyCQOPI56oJ](https://scholar.google.com/scholar?start=60&q=peningkatan+kualitas+hidup+pemberdayaan+perempuan&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3D7KyCQOPI56oJ)
- Sulaeman, M. M. (2020). Sosialisasi Kewirausahaan dalam Upaya Peningkatan UMKM Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(01), 16. <https://doi.org/10.30736/jab.v2i01.34>
- Syarif, A. (2018). Pemberdayaan Perempuan Menghadapi Modernisasi Pertanian Melalui Kelompok Wanita Tani (Kwt) Pada Usahatani Sayuran Di Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng. *Ziraa'Ah*, 43(1), 77–84.
- Tiara, N., & Bachtiar, Y. (2018). Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Pengrajin Sulaman Bayangan di Barung-Barung Belantai Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Civic Education*, 1(3), 280–288. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i3.203>
- Tjiptaningsih, W. (2017). Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon). *Reformasi: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 1(2), 28–35.
- Topal, A. (2019). Economic reforms and women's empowerment in Saudi Arabia. *Women's Studies International Forum*, 76(September 2018), 102253. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.102253>
- Utami, S. (2019). Eksistensi Perkembangan Perekonomian Perempuan di Era Digitalisasi. *An-Nisa*, 12(1), 596–609. <https://doi.org/10.30863/annisa.v12i1.454>
- Wardhani, C. H., Sumartono, S., & Makmur, M. (2015). Manajemen Penyelenggaraan Program Pelatihan Masyarakat (Studi di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Malang). *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(01), 21–30. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2015.018.01.3>
- Yafiz, M., Yusrizal, Y., & Fatimah, F. (2015). Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Tanjung Balai. <http://repository.uinsu.ac.id/5051/1/penelitian-pemberdayaan-perempuan-ok.pdf>